

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola pemerintah semakin besar jumlahnya. Semakin besar dana masyarakat yang dikelola menuntut pertanggungjawaban yang semakin baik. Akuntansi pemerintahan yang semakin baik dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang semakin baik.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut,

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Yuliana, Jurnal, 2013).

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Besaran dana yang dialokasikan dalam APBD dapat memberikan gambaran ukuran kinerja dalam pengelolaan. Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk melaksanakan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah juga cenderung melemah, yang berakibat kepada wujud daerah dan pemerintah daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai.

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban merupakan salah satu instansi pemerintah yang juga mengelola APBD untuk kepentingan pegawai maupun masyarakat sekitar. Terutama bidang pariwisata, akan banyak dana yang digunakan untuk mengelola tempat-tempat wisata yang ada di kabupaten Tuban, oleh sebab itu perlu pengelolaan yang baik terhadap APBD yang telah dianggarkan. Misalnya, belanja yang dilakukan jangan sampai melebihi dari yang telah dianggarkan karena jika hal itu terjadi maka termasuk pemborosan, tetapi jika realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan ini juga kurang baik karena kurang optimalnya penggunaan dana APBD tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut agar dapat mengetahui tingkat kinerja APBD dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban”**.

1.2 Penjelasan Judul

1. Analisis

Menurut Kamus Akuntansi, analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

2. Kinerja

Menurut Moh. Mahsun, Firma Sulistiyowati, dan Heribitus Andre Purwanugraha dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2011 : 141), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Moh. Mahsun, Firma Sulistiyowati, dan Heribitus Andre Purwanugraha dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2011 : 81), anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana kinerja pendapatan pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013-2015?
2. Bagaimana kinerja belanja pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013-2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui kinerja pendapatan pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013-2015.
2. Untuk mengetahui kinerja belanja pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio – rasio untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD (kinerja APBD). Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Dinas Perekonomian dan Pariwisata sehingga dapat dijadikan acuan dalam merencanakan dan penyusunan APBD.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku ilmiah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Metode ini dilakukan dengan membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan.

c) Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai atau tanya jawab secara langsung dengan pihak instansi pemerintah, yakni pegawai di bidang penganggaran pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban untuk memperoleh data ataupun keterangan yang diperlukan.